

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Mewujudkan cita-cita bangsa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan fundamental Negara Indonesia yang diwujudkan melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan daya saing tinggi, berkeadilan, terintegrasi, dan berkelanjutan menuju kondisi yang lebih baik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya di Indonesia, hal ini bukanlah perkara sederhana mengingat negara menghadapi problematika kemiskinan dalam proses pembangunannya (Nabilawaty & Hutajulu, 2021). Menurut Handani & Suharianto (2025) Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan cara mendorong pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak serta memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah, hal ini membuat Indonesia pantas disebut sebagai negara yang kaya akan sumber dayanya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Namun faktanya, banyak penduduk masih hidup dalam garis kemiskinan. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena faktor-faktor yang saling memperkuat, seperti rendahnya pendidikan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, dan terbatasnya kesempatan kerja (Nurkse, 1953). Salah satu akar penyebabnya adalah

keterbelakangan sumber daya manusia yang mengakibatkan produktivitas rendah. Pendidikan yang rendah menurunkan kemampuan produktif dan pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan kemiskinan, sebagaimana ditemukan oleh Hasanah et al. (2021) dan Widya Ningsih et al. (2022). Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja menyebabkan sedikitnya anggota rumah tangga yang bekerja, sehingga mengurangi pendapatan dan meningkatkan risiko kemiskinan. Temuan ini didukung oleh penelitian Fitria & Novita (2024) serta Murialti & Romanda (2020). Di sisi lain, kelemahan pasar tenaga kerja dan kurangnya akumulasi modal akibat rendahnya investasi menyebabkan terbatasnya kesempatan kerja yang kemudian tercermin dari tingginya tingkat pengangguran terbuka. Tingginya tingkat pengangguran terbuka semakin melemahkan pendapatan rumah tangga dan memperkuat lingkaran kemiskinan, sejalan dengan temuan Hardinandar (2019) dan Nabilawaty & Hutajulu (2021). Akar penyebab dari rendahnya akumulasi modal adalah keterbelakangan yang termasuk salah satu dari faktor-faktor penyebab lainnya.

Pemerintah Indonesia mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 (Badan Pusat Statistik, 2020). Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amartya Sen menyatakan bahwa asal sejahteranya individu ialah kemampuan untuk bisa berfungsi layak dalam masyarakat. Kondisi sejahtera yang dimaksud adalah saat

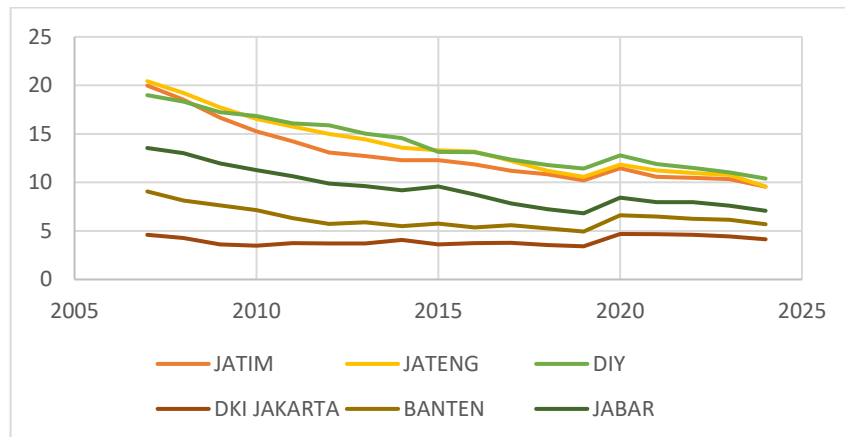
terpenuhinya kebutuhan dasar akan gizi, pendidikan, perumahan, penghasilan, kebebasan dalam memilih, dan mendapat perlindungan dari risiko yang mengancam hidupnya (Nuryitmawan, 2016).

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi negara di seluruh dunia. Hal ini mencakup situasi di mana individu atau kelompok tidak mendapatkan akses cukup layak terhadap sumber daya dan layanan penting berupa kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga meliputi keterbatasan akses terhadap sumber daya, peluang, dan layanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup (Saputri dkk., 2025). Isu ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, dan tetap menjadi tantangan yang dihadapi oleh seluruh negara, baik yang sudah maju maupun yang berkembang, termasuk Indonesia.

Pulau Jawa merupakan pusat kegiatan ekonomi dan menjadi kontributor utama terhadap perekonomian, Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia dan dihuni oleh lebih dari setengah jumlah penduduk nasional. Kondisi tersebut menjadikan Pulau Jawa sebagai penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. PDB Indonesia tercatat mencapai Rp22.139 triliun, dari jumlah tersebut, sebesar 57,04% disumbangkan oleh Pulau Jawa dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,92% (year-on-year). Pulau Jawa merupakan konsentrasi penduduk terbesar di Indonesia yaitu berdasarkan sensus penduduk 2020 Pulau Jawa dihuni oleh 151,6 juta jiwa atau 56,10 persen penduduk Indonesia,

sehingga dinamika kemiskinan di wilayah ini sangat menentukan kondisi kesejahteraan nasional (Badan Pusat Statistik, 2024). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah penduduk 3.970.220 jiwa dan luas daerah 3.185,80 km dengan jumlah penduduk miskin 506,45 ribu orang. Kepadatan penduduk dan luas daerah yang tergolong kecil menyebabkan berbagai permasalahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya yaitu masalah kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2021).

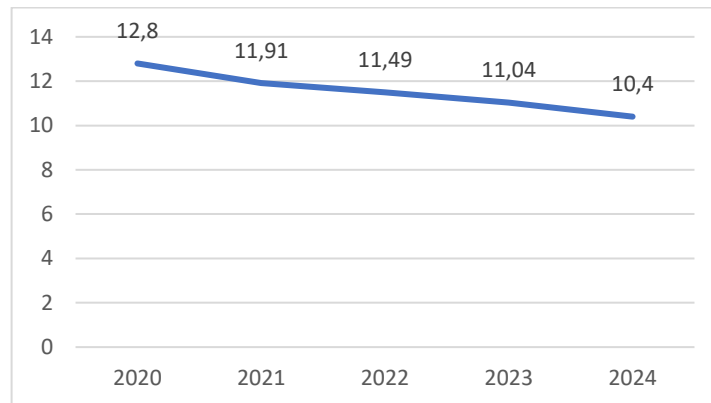
Dalam proses perencanaan pembangun pemerintah, masalah kemiskinan ini termasuk masalah yang harus diatasi dengan serius, karena tinggi atau rendahnya tingkat kemiskinan tersebut akan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian suatu daerah. Meskipun merupakan provinsi dengan wilayah kecil dan hanya terdiri dari lima kabupaten/kota (Gunungkidul, Kulon Progo, Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta) tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tetap menjadi perhatian serius mengingat keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Permasalahan nasional yang dihadapi oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah masih tingginya angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta apabila diperbandingkan dengan lima provinsi lainnya di Pulau Jawa masih tergolong paling tinggi. Pada tahun 2020 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa dan menempati urutan ke-12 dari seluruh provinsi di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2007-2024 (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih menduduki posisi pertama provinsi termiskin di Pulau Jawa, diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan DKI Jakarta menempati posisi terendah dengan tingkat kemiskinan terkecil. Angka kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih lebih tinggi dari angka nasional. Hal ini terlihat pada tahun 2024 di mana kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebesar 10,4%, tingkat kemiskinan nasional Indonesia pada September 2024 sebesar 8,57 % dari total penduduk yang artinya tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih tinggi 1,83% dari tingkat kemiskinan nasional di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024). Untuk melihat tren kemiskinan, berikut gambar yang menunjukkan kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Persen)

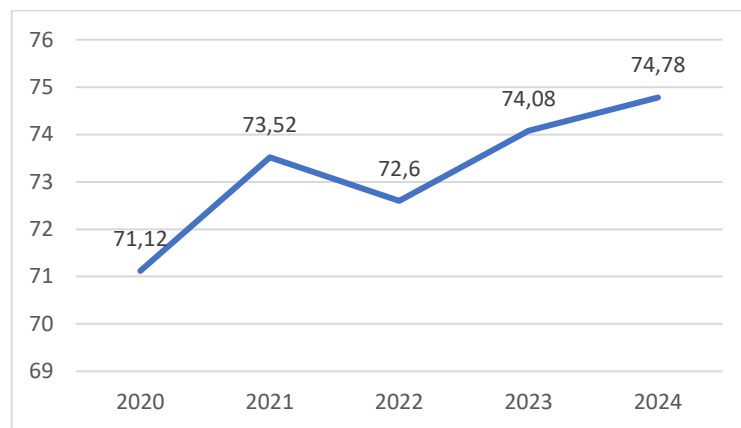
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama periode 2020–2024, tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan, mengindikasikan keberhasilan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan sesudah adanya pandemi. Pada 2020 dan 2021, terjadi peningkatan pada kemiskinan yang disebabkan oleh dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap sektor-sektor utama di DIY, seperti pariwisata dan industri kreatif. Pembatasan ekonomi dan sosial selama pandemi turut memperburuk kondisi kemiskinan di wilayah ini. Memasuki periode akhir, yakni tahun 2022 hingga 2024, data menunjukkan adanya penurunan yang sejalan dengan pemulihan ekonomi dan pelaksanaan program bantuan sosial oleh pemerintah. Ini menandakan bahwa strategi pemulihan pasca-pandemi, termasuk peningkatan akses pekerjaan dan pemulihan sektor-sektor ekonomi penting, mulai memberikan dampak positif. Tren penurunan kemiskinan pada akhir periode juga mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY serta keberhasilan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif (Badan Pusat Statistik, 2024).

Terkait dinamika tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki peran penting karena dapat mempengaruhi kondisi kemiskinan di suatu daerah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan suatu daerah. Rendahnya TPAK menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja tidak aktif dalam kegiatan ekonomi atau mencari pekerjaan, sehingga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Sebaliknya, TPAK yang tinggi mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam pasar kerja, yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, memperluas kesempatan kerja, serta secara keseluruhan membantu menurunkan tingkat kemiskinan.

Namun, meskipun partisipasi angkatan kerja tinggi, dengan kualitas pekerjaan dan upah yang rendah, serta dominasi sektor informal, kemiskinan akan tetap terjadi. Oleh karena itu, faktor-faktor seperti pendidikan juga sangat penting dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan TPAK. Karena keterampilan yang membaik, maka akan tercipta angkatan kerja yang lebih produktif (Wahed et al., 2021). Dengan kata lain, peningkatan partisipasi angkatan kerja harus disertai dengan peningkatan kualitas pekerjaan untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang efektif.

TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk yang memasuki usia kerja. Semakin banyak masyarakat yang termasuk dalam kelompok produktif, maka semakin tinggi pula output yang dihasilkan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan per kapita, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan persentase penduduk miskin (Badan Pusat Statistik,

2021). Untuk mengetahui lebih jelas mengenai perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2020-2024, dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

Gambar 1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Persen)

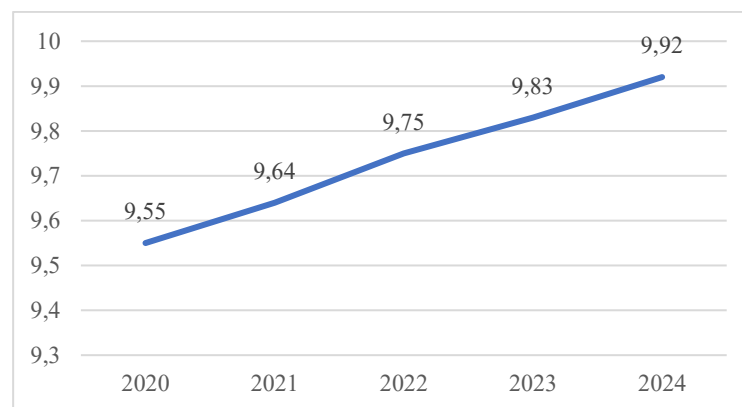
Berdasarkan Gambar 1.3, dapat diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Pada tahun 2020, TPAK sempat menurun hingga mencapai titik terendah, kemudian berangsur meningkat secara bertahap pada tahun 2024. Pola ini menunjukkan adanya dinamika dalam tingkat keterlibatan penduduk usia produktif di pasar kerja. Menurut Anfa dan Bintariningtyas (2024), peningkatan TPAK umumnya berhubungan dengan membaiknya kondisi ekonomi dan meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. Secara keseluruhan, tren kenaikan TPAK di akhir periode menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan serta peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan produktif yang dapat mendukung pengentasan kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagian besar masyarakat bekerja dengan berbagai motivasi, namun tujuan paling mendasar adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah masyarakat yang menghadapi hambatan dalam memperoleh pekerjaan. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, di antaranya ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau perusahaan. Di sisi lain, terdapat tantangan berupa pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja (Surbakti & Hasan (2023)).

Penyebab kemiskinan juga dipengaruhi oleh rendahnya sumber daya manusia akibat kurangnya pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penting bagi penduduk, karena dengan pendidikan seseorang dapat terbebas dari kemiskinan (Sharp dalam Hasanah et al., 2021). Kemiskinan dapat muncul ketika sejumlah besar orang mempunyai pendidikan yang terbatas, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan kemudian berdampak pada pendapatan mereka, yang pada akhirnya mengakibatkan kemiskinan.

Menurut Susanto dan Pangesti (2019), pendidikan merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan individu akan berkembang sehingga mampu mempelajari berbagai keterampilan yang berguna dalam dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan dapat dipandang sebagai bentuk investasi pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang dan hasilnya dapat dirasakan di masa mendatang. Semakin baik kualitas pendidikan seseorang, semakin besar pula

peluangnya untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga dapat memperkecil kemungkinan berada dalam kondisi miskin. Pendidikan dalam penelitian ini diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yaitu jumlah tahun sekolah yang ditempuh oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas sesuai dengan jenjang pendidikan formal yang diakui. Untuk melihat tren rata-rata lama sekolah, berikut gambar yang menunjukkan rata-rata lama sekolah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

Gambar 1.4 Tingkat Pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun)

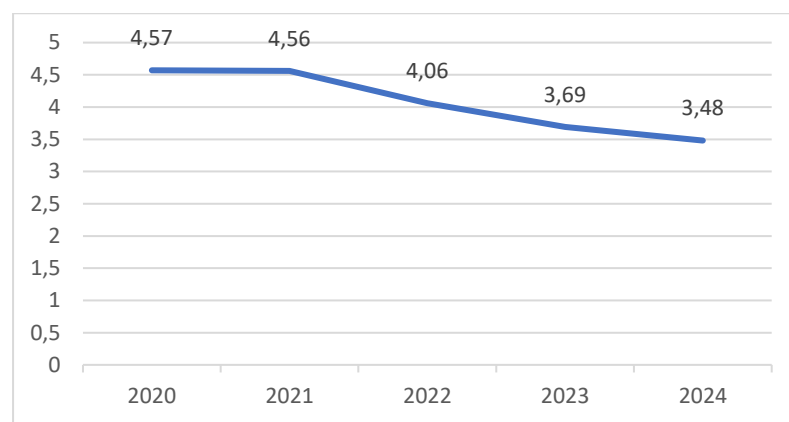
Berdasarkan Gambar 1.4, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan. Widya Ningsih, et.al (2022) mengatakan bahwa pendidikan memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin kecil kemungkinan seseorang berada dalam kondisi miskin.

Menurut Gillis (2000), terdapat dua alasan utama yang menjelaskan pentingnya pendidikan. Pertama, tingginya permintaan terhadap pendidikan disebabkan oleh kepercayaan masyarakat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, semakin besar pula manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh. Kedua, berbagai hasil observasi menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi berkontribusi pada peningkatan pendapatan serta status sosial seseorang di tengah masyarakat.

Kemiskinan di Provinsi DIY pada tahun 2007-2024 tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi angkatan kerja, tetapi juga oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tidak seimbangny jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia ikut menyumbang jumlah pengangguran. Selain itu, dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil perusahaan biasanya melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang akhirnya menambah angka pengangguran. Pengangguran memiliki dampak negatif pada ekonomi, termasuk penurunan daya beli, peningkatan ketimpangan sosial, dan penurunan produktivitas nasional yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemiskinan.

Menurut Putri (2019) banyaknya pengangguran dan rendahnya pendapatan perkapita akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Menurut Nabilawaty dan Hutajulu (2021), jumlah pengangguran dapat mempengaruhi angka kemiskinan suatu daerah, dimana dengan menganggur seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dikarenakan tidak memiliki

pendapatan. Pengangguran dapat menyebabkan pendapatan berkurang dimana kondisi tersebut akan menurunkan tingkat kemakmuran yang tercapai. Meskipun angka kemiskinan di DIY menurun, tingkat pengangguran masih menjadi masalah struktural yang perlu diatasi melalui kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif. Untuk melihat tren pengangguran, berikut gambar yang menunjukkan pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

Gambar 1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Persen)

Gambar 1.5 menunjukkan tren tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2020 hingga 2024. Terlihat bahwa tingkat pengangguran cukup mengalami penurunan pada periode tersebut. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi di tahun 2020, di mana tingkat pengangguran meningkat tajam akibat pandemi COVID-19. Di tahun 2022, tingkat pengangguran mulai menurun namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Hingga tahun 2024, tingkat pengangguran mengalami penurunan. Hal ini karena pemulihan COVID-19 yang didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan pembukaan kembali sektor-sektor yang sebelumnya terpengaruh oleh pembatasan. Dengan semakin baiknya penanganan pandemi dan pelonggaran pembatasan sosial,

banyak perusahaan mulai membuka lowongan kerja Kembali. Penurunan ini mencerminkan adanya pemulihan ekonomi, perbaikan kondisi pasar kerja, serta meningkatnya daya serap tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Indonesia, termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun masih terdapat kesenjangan penelitian yang dapat diisi. Anfa dan Bintariningtyas (2024) menemukan bahwa pendidikan dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DIY, namun penelitian tersebut belum memasukkan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang berpotensi memediasi hubungan antara pendidikan dan kemiskinan. Sementara itu, Nabilawaty dan Hutajulu (2021) meneliti determinan kemiskinan di DIY periode 2015–2020 dengan memasukkan variabel ekonomi makro seperti PDRB dan pengangguran, tetapi periode penelitian yang relatif singkat belum mampu menggambarkan dinamika kemiskinan jangka panjang hingga masa pascapandemi.

Di sisi lain, Nurhaila (2024) mengkaji pengaruh TPAK dan IPM terhadap kemiskinan di Aceh dan menunjukkan adanya hubungan signifikan antara partisipasi tenaga kerja dan tingkat kemiskinan, namun konteks wilayah Aceh memiliki struktur ekonomi yang berbeda dari DIY sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan. Penelitian oleh Widya Ningsih, Fitriyana, dan Hernisyafitri (2022) menambahkan variabel pendidikan, PDRB, dan pengangguran terhadap kemiskinan di DIY, namun analisisnya belum mempertimbangkan interaksi antara variabel ketenagakerjaan dan pendidikan. Sementara itu, Handani dan Suharianto

(2025) menunjukkan bahwa TPT, PDRB, dan TPAK berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, namun fokus wilayah penelitian di luar Pulau Jawa menyebabkan hasilnya belum dapat mencerminkan karakteristik ekonomi DIY yang lebih berorientasi pada sektor jasa dan pendidikan tinggi.

Berdasarkan kajian tersebut, terlihat bahwa penelitian mengenai pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan periode yang lebih panjang (2007–2024) masih jarang dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika kemiskinan di DIY dalam jangka panjang serta kontribusi ketiga variabel ketenagakerjaan dan pendidikan terhadap penurunan kemiskinan di tingkat regional, sekaligus mengisi celah penelitian yang ada dengan menggunakan data time series yang mencakup periode sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19. Fenomena kemiskinan yang lebih tinggi dari kemiskinan nasional di DIY menunjukkan urgensi penelitian ini agar penduduk di DIY tidak terperangkap dalam lingkaran kemiskinan dan dapat dirumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan struktural yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana pengaruh beberapa faktor seperti, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran**

Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2024”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2024?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis pengaruh antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode penelitian.
2. Untuk menganalisis pengaruh antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode penelitian.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi ilmiah dalam menambah pengetahuan dan wawasan baru terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara khusus, penelitian ini menggunakan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka, yang menggunakan data time series dengan periode yang relatif panjang (2007–2024) sehingga mampu menunjukkan dinamika kemiskinan dalam jangka panjang, termasuk fase sebelum pandemi, saat pandemi COVID-19, dan periode pemulihan pascapandemi, yang masih jarang dikaji dalam penelitian sebelumnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan bagi pihak yang melakukan penelitian dengan topik yang sama serta permasalahan yang sama, ataupun ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan menjadikan penelitian ini sebagai referensi.
- b. Bagi pemerintah, menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

